



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEFIAR ANIS**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **195204**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.970.050.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/134 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
2. Tanah Seluas 1361 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 310.050.000
4. Tanah Seluas 617 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
5. Tanah Seluas 1900 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 62.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.680.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 940.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV TURBO / PRESTIGE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4X2 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 668.340.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.309.950.163**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.888.340.163
III. HUTANG	Rp.	116.532.034
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.771.808.129

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.